



CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK) TRIWULAN IV TAHUN 2020



DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



dinsos@bulelengkab.go.id



(0362) 21248



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen



Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, 



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM.

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2
1.3 Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	3
BAB II CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA ..	5
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama	10
BAB III PENUTUP	12
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan



yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Penetapan Peraturan Bupati ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana
 - b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga



- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
5. UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan
 - b. Kepala Tata Usaha UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan

1.3. Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah



- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 dalam pencapaian Misi 1 yaitu :

Tabel 2.1.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i>			
MISI I : Memantapkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. • Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial. • Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.



Tabel 2.1.2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.	Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang tertangani	2,75%	5,80%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinsos
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial .	Sosial	Dinsos
	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.	Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,28%	20,55%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	Dinsos
						Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Sosial	Dinsos



A. Strategi Dan Arah Kebijakan

Sebagai penjabaran dan penerapan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2017-2022, sebagai berikut :

1. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai upaya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara optimal yaitu : **Peningkatan Aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan Peningkatan Perlindungan sosial serta pemberdayaan usaha ekonomi bagi PMKS** , melalui :

- a. Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.
- b. Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
- d. Menyelenggarakan perlindungan sosial , pemberdayaan dan pengembangan sosial.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya



kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan.

Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana seluruh elemen mengetahui tentang apa peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan bidang sosial adalah sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi PMKS*** melalui meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. ***Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS/Masyarakat miskin*** melalui Penggalan dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
3. ***Meningkatkan potensi sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme*** melalui meningkatkan dan memperkuat nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam memantapkan revolusi mental bagi generasi muda dan masyarakat .



Tabel 2.1.3

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.	Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial .
Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan PSKS dalam Penanganan PMKS.	Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan peran aktif dan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha terhadap PMKS sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial .
Meningkatnya Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.	Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Meningkatkan potensi dan sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.



2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan



sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja sebagai Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja).



BAB III

PENUTUP

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah dicapai pertriwulan tahun 2020. Dengan Dokumen Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat melaporkan keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I S/D IV
PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ESELON II																	
A. Kepala Dinas																	
1	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1 Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	0,63	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,00 0,00 0,32 0,31	0,00 0,00 0,32 0,31	- - 100 100			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	382.252.200	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	61.072.200 23.060.000 19.560.000 278.560.000	30.515.960 53.041.150 20.055.660 277.809.340	49,97 230,01 102,53 99,73	
										Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	190.329.700	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	31.399.700 19.810.000 19.560.000 119.560.000	20.733.000 29.951.050 19.560.000 119.263.000	66,03 151,19 100,00 99,75		
										Program pembinaan anak terlantar	96.064.900	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	17.894.900 9.390.000 9.390.000 59.390.000	10.287.000 16.912.650 9.390.000 59.089.000	57,49 180,11 100,00 99,49		
										Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	114.728.200	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25.888.200 14.280.000 14.280.000 60.280.000	15.510.000 24.510.450 14.280.000 59.740.700	59,91 171,64 100,00 99,11		
										Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	645.904.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	232.867.000 77.119.000 74.469.000 261.449.000	99.167.000 198.673.090 79.482.000 263.898.980	42,59 257,62 106,73 100,94		
										Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	222.526.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	49.686.000 14.280.000 14.280.000 144.280.000	17.340.000 46.098.500 14.280.000 143.770.000	34,90 322,82 100,00 99,65		
2	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	1 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	%	80,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20 20 20 20	20 20 20 20	100 100 100 100		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.023.350.600	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	312.304.600 223.247.128 212.881.628 274.917.244	240.656.416 239.357.555 221.152.347 316.677.135	77,06 107,22 103,89 115,19		
										Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	197.550.450	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	82.095.000 36.900.000 16.800.000 61.755.450	48.534.235 33.211.340 24.380.060 90.800.840	59,12 90,00 145,12 147,03		
										Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - -	- - - -	- - - -		
										Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52.741.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	19.480.300 11.558.300 6.512.400 15.190.000	8.656.366 17.041.980 11.112.740 15.777.242	44,44 147,44 170,64 103,87		
										Program Perencanaan Anggaran SKPD	106.617.900	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	35.249.700 23.368.200 18.000.000 30.000.000	29.412.910 23.746.400 22.110.480 31.060.800	83,44 101,62 122,84 103,54		
										Program Informasi Pembangunan Daerah	-	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - -	- - - -	- - - -		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	61.348.100	Triwulan I	11.678.100	5.190.000	44,44	
												Triwulan II	4.890.000	11.338.250	231,87	
												Triwulan III	4.890.000	4.890.000	100,00	
												Triwulan IV	39.890.000	39.830.800	99,85	
										Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	96.271.000	Triwulan I	30.531.000	18.395.000	60,25	
												Triwulan II	22.080.000	30.045.100	136,07	
												Triwulan III	22.080.000	22.080.000	100,00	
												Triwulan IV	21.580.000	25.680.000	119,00	
										Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	932.310.950	Triwulan I	277.412.050	255.185.210	91,99	
												Triwulan II	208.192.950	221.686.064	106,48	
												Triwulan III	206.679.650	207.437.302	100,37	
												Triwulan IV	240.026.300	245.145.672	102,13	
TOTAL											4.121.995.000		4.121.995.000	4.103.950.774		

Singaraja, 4 Januari 2021
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Buleleng



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
 Pembina TK I (IV/b)
 NIP. 196912311991031053

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Triwulan III	39.177.900	37.475.000		
												Triwulan IV	64.724.550	66.419.435		
C	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial															
1	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana	Jumlah Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana	KK	2.375	Triwulan I	375	375	100,00		Program Informasi Pembangunan Daerah	-	Triwulan I	-	-		
					Triwulan II	-	-	-				Triwulan II	-	-		
					Triwulan III	-	-	-				Triwulan III	-	-		
					Triwulan IV	2.000,00	2.000,00	100,00				Triwulan IV	-	-		
										Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	645.904.000	Triwulan I	232.867.000	99.167.000		
												Triwulan II	77.119.000	198.673.090		
												Triwulan III	74.469.000	79.482.000		
												Triwulan IV	261.449.000	263.898.980		
D	Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial															
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik	Jumlah Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik	Orang	950	Triwulan I	50,00	50,00	100,00		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	190.329.700	Triwulan I	31.399.700	20.733.000		
					Triwulan II	-	-	-				Triwulan II	19.810.000	29.951.050		
					Triwulan III	-	-	-				Triwulan III	19.560.000	19.560.000		
					Triwulan IV	900,00	900	100,00				Triwulan IV	119.560.000	119.263.000		
										Program pembinaan anak terlantar	96.064.900	Triwulan I	17.894.900	10.287.000		
												Triwulan II	9.390.000	16.912.650		
												Triwulan III	9.390.000	9.390.000		
												Triwulan IV	59.390.000	59.089.000		
										Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	114.728.200	Triwulan I	25.888.200	15.510.000		
												Triwulan II	14.280.000	24.510.450		
												Triwulan III	14.280.000	14.280.000		
												Triwulan IV	60.280.000	59.740.700		
										Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	222.526.000	Triwulan I	49.686.000	17.340.000		
												Triwulan II	14.280.000	46.098.500		
												Triwulan III	14.280.000	14.280.000		
												Triwulan IV	144.280.000	143.770.000		
TOTAL											3.422.925.400		3.422.925.400	3.405.485.256		

Singaraja, 4 Januari 2021



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng,
Putu Kariaman Putra, S.Sos.MM
Pembina Tk.I (I/b)
NIP. 196912311991031053

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I S/D IV
PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ESELON IV																	
A. Sekretariat																	
1. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan																	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	1	Jumlah surat masuk/keluar	Eksamplar	2000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	500 500 500 500	500 500 500 500	100 100 100 100		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.784.400	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	13.184.400 10.200.000 10.200.000 10.200.000	13.176.655 10.200.000 10.200.000 10.200.000		
		2	Jumlah rekening, telepon, air, dan listrik	Rekening	132	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	33 33 33 33	33 33 33 33	100 100 100 100		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.902.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	65.200.600 31.565.628 42.472.528 21.663.244	41.507.726 39.454.185 38.616.287 38.606.716		
		3	Jumlah unit kendaraan	Unit	2	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,5 0,5 0,5 0,5	0,5 0,5 0,5 0,5	100 100 100 100		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.240.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	57.810.000 57.810.000 48.560.000 48.060.000	17.921.100 68.228.750 54.422.500 71.344.500		
		4	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	33	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	8,25 8,25 8,25 8,25	8,25 8,25 8,25 8,25	100 100 100 100		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.000.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	2.500.000 1.500.000 500.000 3.500.000	640.000 2.495.800 - 2.925.700		
		5	Jumlah laporan keuangan	Laporan	12	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3 3 3 3	3 3 3 3	100 100 100 100		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	166.192.200	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	40.959.900 41.331.500 38.844.000 45.056.800	40.958.750 41.244.000 38.844.000 45.141.115		
		6	Jumlah alat kebersihan, jumlah tenaga kebersihan	Unit	28	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	7 7 7 7	7 7 7 7	100 100 100 100		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	157.434.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	34.950.000 34.652.000 30.300.000 57.532.000	30.300.000 34.946.180 34.642.470 57.501.240		
		7	Jumlah alat tulis kantor	Unit	52	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	13 13 13 13	13 13 13 13	100 100 100 100		Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.364.700	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	12.980.900 1.556.800 - 4.827.000	12.978.735 - 1.551.000 4.811.400		
		8	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	Unit	12	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3 3 3 3	3 3 3 3	100 100 100 100		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.667.500	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3.568.150 2.799.250 331.100 7.969.000	3.366.000 1.565.850 1.653.300 7.947.324		
		9	Jumlah komponen instalasi listrik	Unit	12	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3 3 3 3	3 3 3 3	100 100 100 100		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.308.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3.475.100 - - 4.832.900	3.472.810 - - 4.831.530		
		10	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Unit	12	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3 3 3 3	3 3 3 3	100 100 100 100		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	2.250.000 2.250.000 2.100.000 -	1.100.000 1.650.000 1.650.000 2.200.000		
		11	Jumlah makanan dan minuman	Unit	12	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3 3 3 3	3 3 3 3	100 100 100 100		Penyediaan Makanan dan Minuman	13.168.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	4.400.000 2.200.000 2.200.000 4.368.000	4.398.240 2.198.790 2.198.790 4.370.190		
		12	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	Laporan	12	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3 3 3 3	3 3 3 3	100 100 100 100		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	57.878.800	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	32.878.800 - - 25.000.000	32.691.300 - - 24.900.000		
		13	Jumlah dokumen kepegawaian	Laporan	12	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3 3 3 3	3 3 3 3	100 100 100 100		Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	154.811.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	38.146.750 37.381.950 37.374.000 41.908.300	38.145.100 37.374.000 37.374.000 41.897.420		
		14	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	1	Triwulan I Triwulan II Triwulan III	- - 1	- - 1,00	- - 100		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8.500.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III	- 2.500.000 -	- 2.475.000 -		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	1 Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin serta bantuan sembako kepada PMKS	Desa / Kelurahan	148	Triwulan I	25,00	25	100		Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	184.353.000	Triwulan I	25.853.000	-		
					Triwulan II	37,00	37	100				Triwulan II	3.500.000	28.831.450		
					Triwulan III	49,00	49	100				Triwulan III	-	495.000		
					Triwulan IV	37,00	37	100				Triwulan IV	155.000.000	154.450.000		
		2 Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan UEP	KUBE	6	Triwulan I	-	0	-		Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	133.839.200	Triwulan I	29.229.200	24.530.960		
					Triwulan II	-	0	-				Triwulan II	14.670.000	19.319.700		
					Triwulan III	-	0	-				Triwulan III	14.670.000	14.670.000		
					Triwulan IV	6,00	6,00	100				Triwulan IV	75.270.000	75.150.000		
		3 Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP	KUBE	4	Triwulan I	-	0	-		Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	64.060.000	Triwulan I	5.990.000	5.985.000		
					Triwulan II	-	0	-				Triwulan II	4.890.000	4.890.000		
					Triwulan III	-	0	-				Triwulan III	4.890.000	4.890.660		
					Triwulan IV	4,00	4,00	100				Triwulan IV	48.290.000	48.209.340		
3. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial																
1	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	1 Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Orang, Kegiatan	400,2	Triwulan I	200,00	200	100		Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	158.124.750	Triwulan I	70.042.300	66.206.250		
					Triwulan II	1	1	100				Triwulan II	18.780.000	22.560.975		
					Triwulan III	1	1	100				Triwulan III	20.777.900	18.780.000		
					Triwulan IV	200	200	100				Triwulan IV	48.524.550	48.347.635		
		2 Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen Tugu Perjuangan	Monumen	5	Triwulan I	1,25	1,25	100		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan	75.116.600	Triwulan I	21.735.800	16.500.000		
					Triwulan II	1,25	1,25	100				Triwulan II	18.780.800	21.827.070		
					Triwulan III	1,25	1,25	100				Triwulan III	18.400.000	18.695.000		
					Triwulan IV	1,25	1,25	100				Triwulan IV	16.200.000	18.071.800		
C Bidang Perlindungan Jaminan Sosial																
1. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana																
1	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana	1 Jumlah penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	KK, Orang, Orang	2375,3,3	Triwulan I	375,00	375	100		Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	341.717.000	Triwulan I	114.287.000	27.360.000		
					Triwulan II	-	0	-				Triwulan II	27.710.000	110.898.190		
					Triwulan III	-	0	-				Triwulan III	27.360.000	28.855.000		
					Triwulan IV	2000,3,3	2000,3,1	77,78				Triwulan IV	172.360.000	170.193.000		
2. Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga																
1	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial	Lembaga	1	Triwulan I	0,25	0,25	100		Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial	204.963.600	Triwulan I	85.601.600	54.260.000		
					Triwulan II	0,25	0,25	100				Triwulan II	30.950.000	54.728.300		
					Triwulan III	0,25	0,25	100				Triwulan III	30.450.000	33.950.000		
					Triwulan IV	0,25	-	-				Triwulan IV	57.962.000	61.817.980		
3. Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial																
1	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana	Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan	Kali	0	Triwulan I	-	-	-		Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	-	Triwulan I	-	-		
					Triwulan II	-	-	-				Triwulan II	-	-		
					Triwulan III	-	-	-				Triwulan III	-	-		
					Triwulan IV	-	-	-				Triwulan IV	-	-		
		Jumlah pemutahiran data penduduk miskin	Desa/Kelurahan	148	Triwulan I	37,00	37,00	100		Pemutahiran data penduduk miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya	99.223.400	Triwulan I	32.978.400	17.547.000		
					Triwulan II	37,00	37,00	100				Triwulan II	18.459.000	33.046.600		
					Triwulan III	37,00	37,00	100				Triwulan III	16.659.000	16.677.000		
					Triwulan IV	37,00	37,00	100				Triwulan IV	31.127.000	31.888.000		
D Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial																

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak Dan Lanjut Usia															
1.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik	1. Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	Orang	320	Triwulan I	-	-	-		Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	147.773.300	Triwulan I	18.183.300	10.353.000		
					Triwulan II	-	-	-				Triwulan II	10.030.000	17.403.450		
					Triwulan III	-	-	-				Triwulan III	9.780.000	9.780.000		
					Triwulan IV	320,00	320,00	100				Triwulan IV	109.780.000	109.483.000		
		2. Jumlah anak nakal yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja	Anak	0	Triwulan I	-	-	-		Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan keadisabilitas, anak nakal.	41.203.000	Triwulan I	11.863.000	10.155.000		
					Triwulan II	-	-	-				Triwulan II	9.780.000	11.458.050		
					Triwulan III	-	-	-				Triwulan III	9.780.000	9.780.000		
					Triwulan IV	-	-	-				Triwulan IV	9.780.000	9.780.000		
		3. Jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Anak	135	Triwulan I	-	-	-		Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	96.064.900	Triwulan I	17.894.900	10.287.000		
					Triwulan II	-	-	-				Triwulan II	9.390.000	16.912.650		
					Triwulan III	-	-	-				Triwulan III	9.390.000	9.390.000		
					Triwulan IV	135,00	135	100				Triwulan IV	59.390.000	59.089.000		
2.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas															
1.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik	1. Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas keterampilan	Orang	0	Triwulan I	-	-	-		Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	30.316.000	Triwulan I	15.646.000	5.250.000		
					Triwulan II	-	-	-				Triwulan II	4.890.000	15.153.500		
					Triwulan III	-	-	-				Triwulan III	4.890.000	4.890.000		
					Triwulan IV	-	-	-				Triwulan IV	4.890.000	4.890.000		
		2. Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	Orang	288	Triwulan I	50,00	50,00	100		Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	192.210.000	Triwulan I	34.040.000	12.090.000		
					Triwulan II	-	-	-				Triwulan II	9.390.000	30.945.000		
					Triwulan III	-	-	-				Triwulan III	9.390.000	9.390.000		
					Triwulan IV	238,00	238	100				Triwulan IV	139.390.000	138.880.000		
3.	Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial															
1.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik	1. Jumlah pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	Orang	0	Triwulan I	-	-	-		Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	525.000	Triwulan I	525.000	225.000		
					Triwulan II	-	-	-				Triwulan II	-	297.000		
					Triwulan III	-	-	-				Triwulan III	-	-		
					Triwulan IV	-	-	-				Triwulan IV	-	-		
		2. Jumlah KIE Konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	Orang	0	Triwulan I	-	-	-		Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	828.400	Triwulan I	828.400	-		
					Triwulan II	-	-	-				Triwulan II	-	792.550		
					Triwulan III	-	-	-				Triwulan III	-	-		
					Triwulan IV	-	-	-				Triwulan IV	-	-		
		3. Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan yang bermanfaat keterampilan dan bantuan usaha	Orang	0	Triwulan I	-	-	-		Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	22.695.400	Triwulan I	8.025.400	5.640.000		
					Triwulan II	-	-	-				Triwulan II	4.890.000	7.218.700		
					Triwulan III	-	-	-				Triwulan III	4.890.000	4.890.000		
					Triwulan IV	-	-	-				Triwulan IV	4.890.000	4.890.000		
		4. Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial mendapat pelayanan sosial	Orang	60	Triwulan I	-	-	-		Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	92.032.800	Triwulan I	17.862.800	9.870.000		
					Triwulan II	-	-	-				Triwulan II	9.390.000	17.291.750		
					Triwulan III	-	-	-				Triwulan III	9.390.000	9.390.000		
					Triwulan IV	60,00	60	100				Triwulan IV	55.390.000	54.850.700		
E	UPT Monumen Dan Tugu Perjuangan															
1.	Kepala UPT Monumen Dan Tugu Perjuangan															
1.	Meningkatnya nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	1. Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Monumen	5	Triwulan I	1,25	1,25	100		Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	699.069.600	Triwulan I	185.633.950	172.478.960		
					Triwulan II	1,25	1,25	100				Triwulan II	170.632.150	177.298.019		
					Triwulan III	1,25	1,25	100				Triwulan III	167.501.750	169.962.302		
					Triwulan IV	1,25	1,25	100				Triwulan IV	175.301.750	178.726.237		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Kepala Tata Usaha UPT Monumen Dan Tugu Perjuangan																	
1.	Meningkatnya nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	1. Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Monumen	5	Triwulan I	1,25	1,25	100		Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	699.069.600	Triwulan I	185.633.950	172.478.960				
					Triwulan II	1,25	1,25	100					Triwulan II	170.632.150	177.296.019			
					Triwulan III	1,25	1,25	100					Triwulan III	167.501.750	169.962.302			
					Triwulan IV	1,25	1,25	100					Triwulan IV	175.301.750	178.726.237			
TOTAL											4.821.064.600		4.821.064.600	4.802.416.292				

Singaraja, 4 Januari 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng



I Putu Kartaman Putra S.Sos.MM
Pembina Tk. I (W/b)
NIP. 196912311991031053

No	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16	17
	pengelolaan sarana dan prasarana	bahan pengelolaan sarana dan prasarana yang dibantu			Triwulan II	3,00	3,00	100,00								
					Triwulan III	3,00	3,00	100,00								
					Triwulan IV	3,00	3,00	100,00								
4	Membantu Penyiapan bahan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana	Jumlah Penyiapan bahan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana yang dibantu	Kali	12	Triwulan I	3,00	3,00	100,00								
					Triwulan II	3,00	3,00	100,00								
					Triwulan III	3,00	3,00	100,00								
					Triwulan IV	3,00	3,00	100,00								
5	Penyiapan bahan pemenuhan standar Nasional Sarana dan Prasarana	Jumlah bahan pemenuhan standar Nasional Sarana dan Prasarana yang disiapkan	Kali	12	Triwulan I	3,00	3,00	100,00								
					Triwulan II	3,00	3,00	100,00								
					Triwulan III	3,00	3,00	100,00								
					Triwulan IV	3,00	3,00	100,00								
6	Membantu Penyiapan bahan peengadaan dan peridustrian sarana dan prasarana	Jumlah Penyiapan bahan peengadaan dan peridustrian sarana dan prasarana yang dibantu	Kali	12	Triwulan I	3,00	3,00	100,00								
					Triwulan II	3,00	3,00	100,00								
					Triwulan III	3,00	3,00	100,00								
					Triwulan IV	3,00	3,00	100,00								
TOTAL																

Singaraja, 4 Januari 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196912311991031053

